

Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip *Good University Governance* Dalam Pengelolaan Aset Tetap (Studi Kasus Pada Universitas Muhammadiyah Sukabumi)

Elin Yuniarti

Ekonomi/Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: elinyuniarti5680@gmail.com

Gatot Wahyu Nugroho

Ekonomi/Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: gatotwahyunu2@gmail.com

Abstrac. *The method used is a qualitative research method with a descriptive approach. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation, then the data analysis techniques used were data reduction, data presentation and finally drawing a conclusion. The principles of good university governance in this study use five aspects, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. The results of the research conducted show that (1) the process of managing fixed assets at the Muhammadiyah University of Sukabumi at this time is that there are still some problems found, (2) the implementation of the principles of good university governance at the Muhammadiyah University of Sukabumi is not well implemented, this is evident from the non-fulfillment of two principles of good university governance, namely transparency and responsibility, (3) how to implement good university governance in the management of fixed assets at the Muhammadiyah University of Sukabumi, namely the existence of information technology system assistance, the existence of a fixed asset management manual from PP Muhammadiyah (2) the obstacles are limited human resources, time, and lack of participation of fixed asset managers, how to overcome this by making an action plan table.*

Keywords: *Good University Governance, Fixed Asset.*

Abstrak . Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian teknis analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan terakhir menarik sebuah kesimpulan. Prinsip *good university governance* dalam penelitian ini menggunakan lima aspek yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa (1) proses pengelolaan aset tetap di Universitas Muhammadiyah Sukabumi pada saat ini yaitu masih ditemukannya beberapa permasalahan, (2) implementasi prinsip *good university governance* di Universitas Muhammadiyah Sukabumi kurang diterapkan dengan baik, hal ini terbukti dari tidak terpenuhinya dua prinsip *good university governance* yaitu transparansi dan responsibilitas, (3) cara implementasinya *good university governance* dalam pengelolaan aset tetap di Universitas Muhammadiyah Sukabumi yaitu adanya bantuan sistem teknologi informasi, adanya buku panduan pengelolaan aset tetap dari PP Muhammadiyah (2) hambatannya yaitu terbatasnya SDM, waktu, dan kurangnya partisipasi pengelola aset tetap, cara mengatasinya dengan membuat tabel *action plan*.

Kata kunci: *Good University Governance, Aset Tetap.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perguruan Tinggi merupakan sebuah institusi yang sangat terikat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan partisipasi dari masyarakat. Perguruan Tinggi Muhammadiyah & Aisyiyah (PTMA) pada saat ini perkembangannya semakin pesat dalam jumlah dan mutunya. Menurut (Afandi, 2022) di Indonesia terdapat 172 Perguruan Tinggi

Muhammadiyah Aisyiyah Per Desember 2022 diantaranya dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Distribusi PTMA

Kategori	PTM	PTA	Jumlah
Universitas	79	2	81
Sekolah Tinggi	53	3	56
Akademi	1	0	1
Institut	27	1	28
Politeknik	3	3	6
Jumlah	163	9	172

Sumber: Muhammadiyah.or.id, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah & Aisyiyah semakin berkembang dan semakin pesatnya pendidikan, maka dari itu diperlukan penyelenggaraan perguruan tinggi yang efektif serta efisien dan memerlukan sarana dan prasarana yang mencukupi. Untuk mengakomodasi pengelolaan aset tetap perguruan tinggi, maka pihak perguruan tinggi perlu memiliki dasar *good university governance* sebagai dasar untuk keberhasilan pengelolaan aset tetap milik perguruan tinggi (Setiabudhi, 2019).

Prinsip *good university governance* tidak jauh berbeda dengan *good corporate governance*. Prinsip *good university governance* diterapkan di perguruan tinggi agar adanya tata kelola yang baik di perguruan tinggi. Menurut Wijatno (2009:370) Prinsip-prinsip yang digunakan dalam *good university governance* diantaranya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Kelima indikator tersebut dapat diimplementasikan dalam pengelolaan aset tetap di perguruan tinggi.

Berdasarkan observasi awal di Universitas Muhammadiyah Sukabumi peneliti menemukan beberapa permasalahan berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu pengelola aset tetap Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yaitu pada beberapa peralatan masih terdapat peralatan yang belum diberi barcode atau label sehingga apabila barang tersebut hilang maka susah untuk dicek dimana keberadaan barang tersebut, setiap jalan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi belum sepenuhnya dilengkapi jalan untuk pengguna kursi roda/penyandang disabilitas, jaringan wifi yang sangat terbatas sehingga tidak terjangkau ke setiap ruang perkuliahan, aset tetap yang rusak sebagian belum direklasifikasi dan disimpan tidak sesuai dengan penempatannya, dan permasalahan lainnya yaitu sebagian pengurus pengelola aset tetap kurang memahami prinsip *good university governance*. Berdasarkan permasalahan tersebut terlihat bahwa pengelolaan aset tetap di Universitas Muhammadiyah Sukabumi secara keseluruhan kurang terkelola dengan optimal yang mengharuskan tata kelola universitas yang baik diterapkan. Agar pengelolaan aset tetap yang

belum terkelola itu berkurang yaitu dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *good university governance*.

Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana proses pengelolaan aset tetap Universitas Muhammadiyah Sukabumi saat ini?
- 2 Apa saja prinsip-prinsip *good university governance* yang harus diimplementasikan dalam pengelolaan aset tetap Universitas Muhammadiyah Sukabumi?
- 3 Bagaimana cara mengimplementasikan prinsip-prinsip *good university governance* dalam pengelolaan aset tetap di Universitas Muhammadiyah Sukabumi?
- 4 Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi prinsip-prinsip *good university governance* dalam pengelolaan aset tetap Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan bagaimana cara mengatasinya?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian *Good University Governance*

Menurut Wijatno (2009:126) *good university governance* dapat dilihat sebagai penerapan prinsip-prinsip yang menggunakan dasar konsep “*good governance*” pada sistem dan proses *governance* pada institusi perguruan tinggi, melalui tahap penyesuaian yang dilaksanakan berdasarkan pada nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi pada penyelenggaraan perguruan tinggi secara khusus dan pendidikan secara umum.

Prinsip-Prinsip *Good University Governance*

Menurut Wijatno (2009:370) terdapat 5 prinsip *good university governance*, diantaranya:

- 1 Transparansi

Transparansi yaitu keterbukaan, dimana pada perguruan tinggi harus mempunyai arus informasi yang bebas. Seluruh proses baik pemerintahan, lembaga, dan informasi harus bisa diakses oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan informasi yang ada harus memadai agar dapat dipantau dan dimengerti (Ismatullah & Kartini, 2018).

Menurut (Larasati et al., 2018) indikator transparansi yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi terkait rencana strategis yang sudah dikembangkan kepada civitas akademik.
2. Keterbukaan dalam bidang keuangan serta sistem pelaporan keuangan pada pengelolaan aset tetap.

3. Kebijakan dalam pengelolaan aset tetap dikomunikasikan dan didokumentasikan kepada pihak eksternal maupun internal pada perguruan tinggi.

2 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban, dimana universitas harus memiliki uraian tanggung jawab dan tugas yang jelas atau tertulis dari pejabat structural, pengurus yayasan, dosen, anggota senat fakultas/akademis, dan karyawan.

Menurut (Larasati et al., 2018) indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

1. Mempunyai tugas dan uraian tanggung jawab yang jelas dari setiap anggota senat fakultas/akademis, pejabat structural, dosen serta karyawan yang selaras dengan visi serta rencana strategis.
2. Sistem pengendalian internal dilaksanakan secara aktif pada pengelolaan aset tetap.
3. Pengukuran kinerja untuk tujuan mengendalikan dan mengevaluasi aktifitas organisasi dapat dicapai dengan efisien dan efektif.

2. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan kemampuan suatu organisasi untuk mengatur sejauhmana perguruan tinggi dalam memberikan layanan yang telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau prosedur yang sudah ditetapkan (Larasati et al., 2018).

Menurut (Larasati et al., 2018) indikator responsibilitas yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penyelenggaraan pengelolaan aset tetap.
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat.
3. Pelaksanaan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

4. Independensi

Independensi merupakan pertanggungjawaban atau sikap dan tindakan dalam melakukan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun.

Menurut (Larasati et al., 2018) indikator independensi yaitu sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan dalam pengelola aset tetap perlu terpisah dari pemerintah yang memilikinya sehingga terbebas dari segala benturan kepentingan didalamnya.
2. Menghindari terjadinya dominasi dari pihak manapun.

3. Pelaksanaan fungsi dan tugas pada pengelola aset tetap bebas dari segala tekanan dan pengaruh yang bersifat eksternal dan internal.

5. Keadilan

Perguruan tinggi harus mempunyai sikap adil dan berimbang kepada para pemangku kepentingan yang terkait (*equitable treatment*).

Menurut (Larasati et al., 2018) indikator keadilan yaitu sebagai berikut:

1. Perlakuan yang wajar serta setara kepada pihak yang memiliki berkepentingan sesuai dengan manfaat serta kontribusi yang diberikan kepada universitas.
2. Diberikan kesempatan yang sama dalam melakukan tugasnya secara profesional tanpa adanya diskriminasi.
3. Penerapan reward serta punishment kepada semua pihak tanpa adanya diskriminasi.

Pentingnya Penerapan *Good University Governance*

Menurut Wijatno (2009:128) Manfaat pelaksanaan *good governance* yaitu:

1. Untuk mengangkat status dari perguruan tinggi itu sendiri.
2. Adanya perkembangan institusi secara positif.
3. Pelaksanaan *good governance* diperlukan pada tingkat institusi dan individu yang melibatkan paradigma.
4. Kehadiran perangkat yang tepat dapat melakukan *good governance* juga dibutuhkan sebagai alat untuk mengkomunikasikan suatu keuntungan yang didapat dari memberikan panduan yang komprehensif.

2.1. Aset Tetap

Menurut Sunarto (2003:77) aset tetap atau aktiva tetap merupakan aset yang memiliki sebuah manfaat dalam waktu jangka panjang (lebih dari satu tahun). Aset tetap tersebut dipergunakan secara aktif untuk kegiatan usaha dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan kembali dalam rangka untuk mendapatkan laba.

2.2.1 Klasifikasi Aset Tetap

Menurut Sunarto (2003:77) Aset tetap dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu Aset tetap berwujud (*tangible fixed assets*) dan aset tetap tidak berwujud (*intangible fixed assets*)

2.1.2. Harga Perolehan Aset Tetap

Menurut Sunarto (2003:79) harga perolehan aset tetap dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut:

1. Harga perolehan aset tetap berwujud

Harga perolehan aset tetap berwujud yaitu semua pengorbanan untuk memperolehnya sampai dalam keadaan siap digunakan secara aktif. Ada berbagai cara memperoleh aset tetap yang mempengaruhi harga perolehannya yaitu: Pembelian tunai dan pembelian kredit jangka panjang.

2. Harga perolehan aset tetap tidak berwujud

Aset tetap tidak berwujud yaitu keistimewaan, hak dan keunggulan kompetitif yang berasal dari pemilikan aset jangka panjang yang tidak memiliki wujud fisik. Aset tetap tidak berwujud diperoleh dari pemberian pemerintah seperti hak cipta, hak paten, franchise dan merek dagang dan membeli perusahaan lain.

2.2. Pengelolaan Aset Tetap

Pengelolaan aset/manajemen aset adalah suatu kegiatan pengelolaan aset, agar aset tersebut dapat bermanfaat dan jangan sampai aset tersebut punah, kecuali aset tersebut memang ada keharusan untuk dihapuskan (Aryani Soemitro & Suprayitno, 2018).

2.3.1. Siklus Pengelolaan Aset Tetap

Menurut Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah (2020:5) siklus pengelolaan aset tetap yaitu suatu susunan kegiatan atau tindakan yang meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
2. Pengadaan
3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran
4. Penggunaan
5. Penatausahaan
6. Pemanfaatan
7. Pengamanan dan pemeliharaan
8. Penilaian
9. Penghapusan
10. Pemindahtanganan
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
12. Pembiayaan
13. Tuntutan ganti rugi

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2022) Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang memakai konteks alamiah dengan maksud memberikan suatu fenomena yang terjadi dan dilaksanakan dengan menyangkutkan dengan metode yang sudah ada, Sedangkan penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang menjelaskan atau mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat ini (Sujana dan Ibrahim dalam Arum, 2019). Teknik pengumpulan data menggunakan data primer melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis sebelum di lapangan dan analisis selama dan sesudah di lapangan yaitu berupa reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengelolaan Aset Tetap di Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Proses pengelolaan aset tetap di Universitas Muhammadiyah Sukabumi pada saat ini sudah menggunakan Peraturan dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sudah diterapkan sejak tahun 2022 akhir sampai sekarang. Adapun proses atau siklus pengelolaan aset tetap di Universitas Muhammadiyah Sukabumi sebagai berikut:

1 Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Dari hasil wawancara peneliti di lapangan untuk perencanaan kebutuhan dan penganggaran pada saat ini di Universitas Muhammadiyah Sukabumi yaitu adanya kebijakan *one gate policy* atau kebijakan satu pintu. Misal dari unit kerja ada komputer rusak tentu saja dari unit kerja tersebut merencanakan kebutuhan untuk pembelian komputer baru, maka dari unit kerja mengajukan surat permohonan yang ditujukan untuk wakil rektor II, dan wakil rektor II mengadakan verifikasi kebutuhan barang dan mendisposisi hasil verifikasi tersebut lalu disampaikan ke bagian keuangan untuk mengevaluasi hasil verifikasi dengan ketersediaan dana, apabila dana tersedia lalu bagian umum yang akan mengadakan pengadaan barang. Untuk kebutuhan dan penganggaran setiap unit kerja biasanya dilaporkan di akhir tahun akademik sebelum masuknya tahun akademik baru, setelah itu diakumulasi untuk semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh unit kerja tersebut dan masuk ke anggaran

bagian umum, jadi nanti bagian umum yang akan mengadakan pengadaan barang tersebut.

2 Pengadaan

Setelah perencanaan kebutuhan dan penganggaran maka tahap selanjutnya bagian umum mengadakan pengadaan. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan untuk pengadaan itu ada PIC (*Person in Charge*) atau penanggung jawabnya. Contoh untuk pembelian komputer bagian pengadaan terjun langsung untuk membeli komputer tersebut, dan apabila pembelian barangnya berupa mesin maka bagian pengadaan akan mengajak salah satu unit kerja yang bersangkutan untuk mengecek langsung ke toko tersebut dan biasanya setiap pembelian barang tidak hanya ditoko yang sama terkadang membeli secara online dan apabila tidak memungkinkan maka pembeliannya secara offline atau datang langsung ke toko. Untuk budgetnya itu sendiri bagian umum sudah ada pagu khusus dari universitas dan pembagian pagu tersebut sesuai dengan IKU (Indikator Kinerja Utama). Bagian umum dibawah pimpinan wares 2 mempunyai anggaran tersendiri untuk penganggaran yang sudah ditetapkan diawal tahun, karena adanya kebijakan *one get police* atau kebijakan satu pintu maka baik itu pendapatan maupun pengeluaran maka pagu pengadaan semua disediakan oleh universitas melalui bagian umum.

3 Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran

Dalam proses ini terdapat masalah dimana belum semua barcode atau label diterapkan pada semua aset tetap terutama pada kursi dan meja masih ada yang belum diberi barcode, sedangkan menurut informasi awal bahwa sebelum barang digunakan itu ada pelabelan/barcode terlebih dahulu akan tetapi yang menjadi masalah yaitu masih ada aset tetap yang belum diberi barcode padahal sebelum barang digunakan ada pelabelan terlebih dahulu, namun setelah wawancara langsung ke lapangan ternyata aset tetap yang belum diberi barcode tersebut merupakan aset tetap yang sudah lama tahun pembeliannya sedangkan sistem pelabelan/barcode itu baru diterapkan beberapa tahun kebelakang, namun hal ini tentu menjadi sebuah permasalahan karena seharusnya ada pelabelan ulang terhadap barang yang belum diberi barcode.



Gambar 1. Salah satu contoh peralatan yaitu kursi diruang perkuliahan yang belum diberi barcode/label.

4 Penggunaan

Setelah barang disalurkan oleh bagian umum ke unit kerja lalu masuk ke tahap penggunaan, untuk aturan penggunaan biasanya dikembalikan ke unit kerja sesuai dengan barang yang digunakan. Untuk penggunaan biasanya barang diganti itu dilihat dari umur ekonomis atau masa manfaat, untuk masa ekonomisnya 5 tahun, jadi kalau melebihi umur ekonomis akan tetapi masa manfaatnya masih bisa digunakan itu tetap digunakan.

Dalam penggunaan tidak ditemukan masalah karena dalam penggunaan adanya penetapan status penggunaan aset tetap yang jelas seperti adanya berita acara penerimaan aset tetap, dengan adanya status penggunaan aset tetap maka barang sudah ada penanggung jawabnya dan sudah ada unit kerja penerima yang jelas melalui berita acara penerimaan.

5 Penatausahaan

Setelah penggunaan aset tetap maka tahap selanjutnya penatausahaan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa penatausahaan meliputi 3 kegiatan yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Pembukuannya yaitu bagian umum harus melakukan pendataan dan pencatatan aset tetap yang ada dibawah kuasa penggunaanya ke dalam daftar aset tetap pengguna menurut kodifikasi barang. Setelah pembukuan bagian umum melakukan inventarisasi berupa perhitungan aset tetap yang di cek melalui pengecekan berkala yang telah dilakukan setiap tahun, setelah inventarisasi lalu dibuatkan pelaporan yang dicetak per tahun apakah datanya sudah final atau belum, dan dalam pelaporan ada istilah tutup periode setelah tutup periode nanti laporannya bisa dilihat disistem , untuk laporannya dilaporkan ke wakil rektor II dan biasanya digunakan untuk keperluan rektor.

6 Pemanfaatan

Berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan untuk pemanfaatan setiap peralatan masih belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan karena setelah peneliti observasi ke lapangan ternyata ada lemari kayu yang sudah tidak terpakai namun disimpan dimana saja padahal apabila lemari tersebut masih bisa diperbaiki maka bisa untuk dihibahkan kepada pihak lain, permasalahan lainnya yaitu sebuah jalan yang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga tidak ada jalan untuk pengguna kursi roda, namun untuk gedung di Universitas Muhammadiyah Sukabumi sudah dimanfaatkan dengan baik sehingga berada dalam kondisi terawat.



Gambar 4.2. Lemari kayu yang tidak dimanfaatkan dan tidak disimpan sesuai tempatnya, jalan tidak dimanfaatkan dengan baik yaitu tidak adanya jalan untuk pengguna kursi roda/disabilitas.

7 Pengamanan dan Pemeliharaan

Berdasarkan wawancara di lapangan bahwa bentuk Pengamanan secara khusus diserahkan kepada kuasa pengguna di unit kerjanya masing-masing, namun dari bagian umum sudah ada pengamanan secara umum, misalkan adanya patroli satpam untuk mengecek kesetiap ruangan tentang kondisi barang apakah ada yang hilang atau tidak, biasanya dilakukan setiap hari setelah selesai perkuliahan, satpam mempunyai buku khusus untuk mencatat setiap kejadian dan nanti bentuk catatan tersebut diserahkan ke bagian umum dan bagian umum yang akan menindaklanjuti, hal ini merupakan salah satu bentuk penerapan pengamanan aset tetap, namun sejauh ini belum semua ruangan ada bentuk pengamanan secara tertulis misalkan didalam ruangan tertulis data jumlah aset tetap berupa jumlah komputer/kursi, maka dengan cara ini akan mudah untuk mengetahui jumlahnya dan bisa lebih meningkatkan pengamanan, namun di Universitas Muhammadiyah Sukabumi belum memakai aturan tertulis tersebut di setiap ruangan dan hanya ada di beberapa ruangan saja. Sedangkan untuk pemeliharaan ruang lingkungannya yaitu gedung kantor, gedung perpustakaan,

gedung kuliah, begitu pula dengan pemeliharaan tempat parkir, jalan, toilet, trotoar, saluran air hujan, dll. Untuk pemeliharaan bagian umum mendata kondisi gedung apakah kondisinya terawat atau tidak. Setelah peneliti observasi ke lapangan ternyata aturan tertulis disebuah gedung/ruangan sangat diperlukan untuk meningkatkan pengamananan karena peneliti pernah melihat adanya mahasiswa yang melanggar aturan berupa kursi yang berada digedung sebelahnya dipindahkan kemana saja dan tidak dikembalikan ketempat awalnya, hal ini akan berpengaruh apabila adanya pengecekan jumlah aset tetap diruangan tersebut namun ternyata mahasiswa kurang memahami hal tersebut karena tidak adanya aturan secara tertulis.

8 Penilaian

Berdasarkan wawancara di lapangan bahwa pernah terjadi masalah dimana pada laporan keuangan pernah terjadi kesalahan dimana aset tetap bernilai Rp 0,00 hal ini terjadi karena adanya pencatatan double dan adanya kesalahan pencatatan namun hal ini sudah langsung teratasi sebelum sampai pada bagian keuangan, karena tidak mungkin masalah tersebut teratasi tanpa adanya penilaian.

9 Penghapusan

Berdasarkan observasi di lapangan peneliti melihat bahwa aset tetap yang rusak dibiarkan tergeletak dimana saja, padahal di Universitas Muhammadiyah Sukabumi sendiri itu sudah ada fasilitas untuk penyimpanan barang rusak atau gudang namun masih ada beberapa aset tetap rusak yang dibiarkan.



Gambar 4.3. Bagian dari jaringan komputer belum dihapuskan dan disimpan dimana saja.

10 Pemindahtanganan

Pemindahtanganan yaitu pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan, menurut wawancara dilapangan pemindahtanganan dilakukan setelah proses penghapusan, pemindahtanganan bentuknya bisa dijual, dihibahkan bahkan tukar menukar. pemindahtanganan yang bentuknya dijual yaitu misal kendaraan,

kendaraan itu ada umur ekonomisnya dan apabila umur ekonomisnya habis maka harus dijual, jadi nanti kendaraan tersebut dihapuskan terlebih dahulu dalam daftar aset tetap setelah dihapus kendaraan tersebut dijual nanti ada berita acara pemindahtanganan kendaraan tersebut, sedangkan untuk peralatan seperti kursi biasanya pemindahtanganannya berupa hibah, namun untuk pemindahtanganan berupa tanah harus ada persetujuan dari BPH (Badan Pengurus Harian) dan perijinan dari PP Muhammadiyah sebagai pemilik dalam sertifikat tersebut.

11 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan bahwa pembinaan, pengawasan dan pengendalian terlebih dahulu dilakukan oleh bagian umum misal ada aset tetap yang rusak maka bagian umum mengawasi melalui data salah satu contohnya bagian umum mengadakan laporan yang berbentuk pengecekan berkala, sedangkan untuk SPI sejauh ini di Universitas Muhammadiyah Sukabumi dalam waktu dekat akan diadakan audit oleh SPI (Satuan Pengawas Internal).

12 Pembiayaan

Pada proses pembiayaan yaitu di Universitas Muhammadiyah Sukabumi dilaksanakan setiap tahun, pembiayaan tersebut dilakukan untuk kegiatan penyediaan seperti pemeliharaan, inventarisasi, penyediaan buku inventaris, dll.

13 Tuntunan ganti rugi

Berdasarkan wawancara di lapangan bahwa tuntunan ganti rugi itu dilakukan oleh panitia tim Ad Hoc pertimbangan TGR, namun sejauh ini dalam pengelolaan aset tetap di Universitas Muhammadiyah Sukabumi belum ada kasus atau kejadian yang mengharuskan untuk ganti rugi.

Implementasi Prinsip-Prinsip *Good University Governance* dalam Pengelolaan Aset Tetap di Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Berdasarkan hasil penelitian di Universitas Muhammadiyah Sukabumi implementasi prinsip- prinsip *good university governance* yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi

Berikut adalah tabel kesesuaian penerapan prinsip transparansi pada pengelolaan aset tetap di Universitas Muhammadiyah Sukabumi berdasarkan pernyataan menurut (Larasati et al., 2018) yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator kesesuaian transparansi pengelolaan aset tetap Universitas Muhammadiyah Sukabumi menurut (Larasati et al., 2018).

No	Indikator	Hasil Wawancara	Sesuai (S) atau Tidak Sesuai (TS)
1	Sosialisasi terkait rencana strategis yang sudah dikembangkan kepada civitas akademik.	Untuk sosialisasi tentang rencana strategis yang telah dikembangkan kepada civitas akademik berupa sosialisasi tentang adanya kebijakan <i>one gate policy</i> dari bagian umum.	S
2	Keterbukaan dalam bidang keuangan serta sistem pelaporan keuangan pada pengelolaan aset tetap.	Adanya keterbukaan keuangan kepada pimpinan namun untuk pihak civitas akademik tidak mendapatkan akses dalam keterbukaan di bidang keuangan tersebut.	TS
3	Kebijakan dalam pengelolaan aset tetap dikomunikasikan dan didokumentasikan kepada pihak eksternal maupun internal pada perguruan tinggi.	Untuk kebijakan diperguruan tinggi telah dikomunikasikan, salah satunya adanya kebijakan <i>one gate policy</i> tentang pengadaan barang di unit kerja dan telah dikomunikasikan baik kepada pihak intern atau ekstern.	S

Sumber: Larasati et al tahun 2018, data di olah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi dapat di katakan bahwa transparansi pengelolaan aset tetap untuk penerapannya kurang sesuai dengan pernyataan dari Larasati et al pada tahun 2018, yaitu tidak adanya keterbukaan di bidang keuangan dan sistem pelaporan dan hanya pimpinan dan pihak internal yang berkaitan saja yang mengetahui pelaporan keuangan tersebut namun civitas akademik tidak diberikan akses untuk sistem pelaporan keuangan contoh dalam hal pengadaan barang, civitas akademik atau unit kerja hanya mengetahui barangnya saja sudah tersedia namun tapi tidak diberi tahu untuk rincian biayanya karena adanya kebijakan *one gate policy* atau kebijakan satu pintu namun yang seharusnya dilakukan bagian umum harus lebih terbuka atau transparan terkait dengan pelaporan keuangan kepada kepala unit kerja atau civitas akademik, karena menurut (Ismatullah & Kartini, 2018) bahwa bentuk transparansi yaitu adanya arus informasi yang bebas yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan agar dapat dipantau dan dimengerti salah satunya dalam informasi mengenai keuangan, namun transparansi sebagian sudah diterapkan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi seperti adanya sosialisasi terkait kebijakan *one gate policy* dan telah dikomunikasika baik kepada pihak intern maupun ekstern.

2. Akuntabilitas\

Dibawah ini merupakan tabel kesesuaian penerapan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan aset tetap di Universitas Muhammadiyah Sukabumi berdasarkan pernyataan menurut (Larasati et al., 2018) yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator kesesuaian akuntabilitas pengelolaan aset tetap Universitas Muhammadiyah Sukabumi menurut (Larasati et al., 2018).

No	Indikator	Hasil Wawancara	Sesuai (S) atau Tidak Sesuai (TS)
1	Mempunyai tugas dan uraian tanggung jawab yang jelas dari setiap anggota senat fakultas/akademis, pejabat structural, dosen serta karyawan yang selaras dengan visi serta rencana strategis.	Memiliki uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas yaitu adanya struktur organisasi khusus untuk bagian umum pengelola aset tetap dimana terdapat uraian deskripsi tugas dan tanggung jawabnya yang sesuai dengan visi dan rencana strategis.	S
2	Sistem pengendalian internal dilaksanakan secara aktif pada pengelolaan aset tetap.	Sistem pengendalian internal aktif dalam pengelolaan aset tetap.	S
3	Pengukuran kinerja untuk tujuan mengendalikan dan mengevaluasi aktifitas organisasi dapat dicapai dengan efisien dan efektif.	Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui rapat tentang pengelolaan aset tetap yang sering dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengendalikan aktifitas organisasi.	S

Sumber: Larasati et al tahun 2018, data di olah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi dapat di katakan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan aset tetap untuk penerapannya sudah sesuai dengan pernyataan dari Larasati pada tahun 2018, yaitu sudah mempunyai uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas seperti adanya struktur organisasi khusus untuk bagian umum pengelola aset tetap dimana terdapat uraian deskripsi tugas dan tanggung jawabnya yang sesuai dengan visi serta rencana strategis, adanya sistem pengendalian internal yang aktif dalam pengelolaan aset tetap dan pengukuran kinerja telah dilakukan melalui rapat tentang pengelolaan aset tetap dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengendalikan aktifitas organisasi dalam mengelola aset tetap tersebut.

3. Responsibilitas

Responsibilitas atau pertanggungjawaban yaitu kemampuan suatu organisasi untuk mengatur sejauhmana perguruan tinggi dalam memberikan layanan yang telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau prosedur yang sudah ditetapkan. Berikut merupakan tabel kesesuaian penerapan prinsip responsibilitas pada pengelolaan aset tetap di Universitas Muhammadiyah Sukabumi berdasarkan pernyataan menurut (Larasati et al., 2018) yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Indikator kesesuaian responsibilitas pengelolaan aset tetap Universitas Muhammadiyah Sukabumi menurut (Larasati et al., 2018).

No	Indikator	Hasil Wawancara	Sesuai (S) atau Tidak Sesuai (TS)
1	Kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penyelenggaraan pengelolaan aset tetap.	Adanya kepatuhan terkait peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dalam pengelolaan aset tetap yang mengacu pada buku panduan dari PP Muhammadiyah.	S
2	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat.	Kurang adanya kepatuhan dalam peraturan perundang-undangan yang telah dibuat.	TS
3	Pelaksanaan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.	Kurang ada tanggung jawab terhadap masyarakat terhadap lingkungan seperti adanya unit kerja kurang bertanggung jawab terkait aset tetap yang rusak.	TS

Sumber: Larasati et al tahun 2018, data di olah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi dapat di katakan bahwa responsibilitas dalam pengelolaan aset tetap untuk penerapannya kurang sesuai dengan pernyataan dari Larasati et al pada tahun 2018, yaitu meskipun bagian umum telah patuh pada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dalam pengelolaan aset tetap yang mengacu pada buku panduan dari PP Muhammadiyah namun dari pihak masyarakat Universitas Muhammadiyah Sukabumi kurang patuh terkait peraturan perundang-undangan yang telah dibuat tersebut seperti peneliti pernah melihat adanya mahasiswa yang mengambil kursi dari ruang sebelah dan tidak dikembalikan lagi ketempatnya hal ini karena kurang adanya aturan tertulis disebuah ruangan, maka hal ini akan mempengaruhi dalam pengecekan aset tetap pada ruangan tersebut dan apabila ada pengecekan maka aset tetap tersebut akan berkurang, dan kurang ada tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan seperti unit kerja kurang bertanggung jawab terkait aset tetap yang rusak dan dibiarkan dibeberapa ruangan dan tidak dilaporkan ke bagian umum padahal apabila dilaporkan kepada bagian umum akan ditindaklanjuti apakah aset tetap tersebut masih bisa dimanfaatkan atau harus dihapuskan atau dimusnahkan.

4. Independensi

Independensi yaitu sikap dalam melakukan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Berikut merupakan tabel kesesuaian penerapan prinsip responsibilitas pada pengelolaan aset tetap di

Universitas Muhammadiyah Sukabumi berdasarkan pernyataan menurut (Larasati et al., 2018) yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. Indikator kesesuaian independensi pengelolaan aset tetap Universitas Muhammadiyah Sukabumi menurut (Larasati et al., 2018).

No	Indikator	Hasil Wawancara	Sesuai (S) atau Tidak Sesuai (TS)
1	Pengambilan keputusan dalam pengelola aset tetap perlu terpisah dari pemerintah yang memilikinya sehingga terbebas dari segala benturan kepentingan didalamnya.	Pengambilan keputusan pada saat rapat selalu terpisah dan berbeda namun mempunyai tujuan yang sama sehingga tidak terjadi benturan kepentingan.	S
2	Menghindari terjadinya dominasi dari pihak manapun.	Tidak ada dominasi dalam pengambilan keputusan dari pimpinan.	S
3	Pelaksanaan fungsi dan tugas pada pengelola aset tetap bebas dari segala tekanan dan pengaruh yang bersifat eksternal dan internal.	Untuk melaksanakan tugasnya pengelola aset tetap tidak dapat dipengaruhi dan tidak ada tekanan dari pihak internal maupun eksternal.	S

Sumber: Larasati et al tahun 2018, data di olah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi dapat di katakan bahwa independensi dalam pengelolaan aset tetap untuk penerapannya sudah sesuai dengan pernyataan dari Larasati et al pada tahun 2018, yaitu Pengambilan keputusan pada saat rapat selalu terpisah dan berbeda namun mempunyai tujuan yang sama sehingga tidak terjadi benturan kepentingan, tidak ada dominasi dalam pengambilan keputusan dari pimpinan dan dalam pengambilan keputusan tersebut selalu melibatkan pimpinan, untuk melaksanakan tugasnya pengelola aset tetap tidak dapat dipengaruhi dan tidak ada tekanan dari pihak internal maupun eksternal karena apabila terdapat tekanan atau pengaruh dari pihak lain maka pengambilan keputusan tidak akan jelas dan mempunyai benturan.

5. Keadilan

Berikut merupakan tabel kesesuaian penerapan prinsip responsibilitas pada pengelolaan aset tetap di Universitas Muhammadiyah Sukabumi berdasarkan pernyataan menurut (Larasati et al., 2018) yaitu sebagai berikut:

Tabel 6. Indikator kesesuaian keadilan pengelolaan aset tetap Universitas Muhammadiyah Sukabumi menurut (Larasati et al., 2018).

No	Indikator	Hasil Wawancara	Sesuai (S) atau Tidak Sesuai (TS)
1	Perlakuan yang wajar serta setara kepada pihak yang memiliki kepentingan sesuai dengan manfaat serta kontribusi yang diberikan kepada universitas.	Semua pengguna aset tetap mempunyai perlakuan yang adil dalam penggunaan aset tetap tersebut.	S
2	Diberikan kesempatan yang sama dalam melakukan tugasnya secara profesional tanpa adanya diskriminasi.	Semua pengelola aset tetap mempunyai kesempatan yang sama dalam tugas dan dilakukan secara profesional.	S
3	Penerapan reward dan punishment kepada semua pihak tanpa adanya diskriminasi.	Reward telah diberikan kepada pengelola aset tetap supaya menjadi lebih semangat, dan punishment diberikan kepada pelanggar dengan tujuan tertib dan disiplin dalam menjaga aset tetap.	S

Sumber: Larasati et al tahun 2018, data di olah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi dapat dikatakan bahwa keadilan dalam pengelolaan aset tetap untuk penerapannya sudah sesuai dengan pernyataan dari Larasati et al pada tahun 2018, dimana pada semua pengguna aset tetap mempunyai perlakuan yang adil dalam penggunaan aset tetap tersebut seperti unit kerja membutuhkan barang maka bagian umum akan memfasilitasi kebutuhan yang telah diajukan unit kerja tersebut tergantung kesesuaian dana ada atau tidak, semua pengelola aset tetap memiliki kesempatan yang sama dalam tugas dan dilakukan secara profesional sehingga terhindar dari sikap yang tidak sewajarnya, reward telah diberikan kepada pengelola aset tetap yang kerjanya lebih bagus supaya menjadi lebih semangat dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga pengelola aset tetap mempunyai fokus kerja dan semangat dalam mengelola aset tetap tersebut, punishment telah diberikan kepada pelanggar aset tetap dengan tujuan tertib dan disiplin dalam menjaga aset tetap tersebut.

4.4. Hambatan dan Cara Mengatasi dalam Proses Implementasi *Good University Governance* dalam Pengelolaan Aset Tetap

Hambatan dalam implementasi prinsip *good university governance* di Universitas Muhammadiyah Sukabumi yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dimana peneliti merupakan orang di luar organisasi sehingga peneliti hanya memberikan saran yang telah dibuat melalui *action plan* yang sudah disusun namun peneliti tidak bisa memantau secara langsung apakah *action plan* tersebut dijalankan secara efektif atau tidak dalam menyelesaikan permasalahan

pengelolaan aset tetap untuk mewujudkan *good university governance*, kurangnya partisipasi dari masyarakat di Universitas Muhammadiyah Sukabumi dalam mewujudkan *good university governance* meski pimpinan membuka ruang untuk keterlibatan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pengelolaan aset tetap namun masyarakat di Universitas Muhammadiyah Sukabumi kurang berpartisipasi, oleh karena itu apabila ada aset tetap yang kurang terkelola pihak kampus yang lainnya jarang turun tangan dan hanya mengandalkan pengelola aset tetap, hal ini dikarenakan aktivitas masyarakat di Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang juga sibuk melaksanakan tugas dan peran mereka masing-masing dan tidak berfokus pada pengelolaan aset tetap maka ini menjadi penghambat dalam implementasi prinsip *good university governance* dalam pengelolaan aset tetap. Hambatan lainnya yaitu waktu, contohnya terdapat masalah dalam pengelolaan aset tetap berupa label/barcode pada meja dan kursi yang belum sepenuhnya diterapkan karena kurangnya manajemen waktu pengelola aset tetap dalam mengontrol waktu, hal ini akan sangat berpengaruh untuk berhasil atau tidaknya dalam mencapai implementasi *good university governance*.

Cara mengatasi hambatan di atas disusun tabel yang menggambarkan secara singkat permasalahan yang ditemukan dan *action plan* yang harus dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Sukabumi untuk menyelesaikan permasalahan aset tetap yaitu sebagai berikut:

Tabel 6. Tabel *Action Plan* terhadap Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap di Universitas Muhammadiyah Sukabumi

No	Prinsip <i>Good University Governance</i>	Akar Permasalahan	Action Plan
1	Transparansi	Kurang keterbukaan dibidang keuangan dan pelaporan keuangan.	Lebih terbuka mengenai pelaporan keuangan terutama dalam pengadaan barang seharusnya rincian keuangan dalam pengadaan barang unit kerja penerima barang tersebut mengetahui rincian biaya dari setiap pembelian aset tetap tersebut.
2	Responsibilitas	Kurang adanya kepatuhan terkait peraturan perundang-undangan yang telah dibuat	Seharusnya peraturan perundang-undangan dibuat secara tertulis disetiap ruangan agar tidak adanya pelanggaran mengenai aset tetap.
		Kurang adanya tanggung jawab unit kerja terkait aset tetap yang rusak	Ditingkatkan komunikasi antara unit kerja dengan bagian umum agar tidak adanya penyimpangan mengenai aset tetap yang rusak dan segera melaporkan ke bagian umum untuk segera ditindaklanjuti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang dalam Bab Pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian implementasi prinsip-prinsip *good university governance* dalam pengelolaan aset tetap di Universitas Muhammadiyah Sukabumi yaitu sebagai berikut:

1. Proses pengelolaan aset tetap di Universitas Muhammadiyah Sukabumi saat ini sudah menggunakan pedoman dari PP Muhammadiyah dan diberlakukan sejak tahun 2022 akhir hingga sekarang, namun dalam pengelolaan aset tetap masih ditemukan beberapa masalah seperti pada proses penyimpanan aset tetap masih ada aset tetap yang belum diberi barcode/label, pada pemanfaatan yaitu kurangnya pemanfaatan aset tetap seperti adanya aset tetap yang disimpan tidak sesuai dengan tempatnya dan tidak dimanfaatkan dengan baik, jalan belum sepenuhnya dilengkapi untuk penyandang disabilitas, pada pengamanan dan pemeliharaan yaitu kurang adanya aturan tertulis yang ditempel di dinding dan hanya sebagian ruangan saja yang ada aturannya, pada penghapusan masih ada aset tetap yang belum dihapuskan padahal aset tetap tersebut terlihat rusak dan disimpan dimana saja.
2. Prinsip-prinsip *good university governance* dalam pengelolaan aset tetap di Universitas Muhammadiyah Sukabumi kurang diimplementasikan dengan baik, hal ini terbukti dari tidak terpenuhinya dua prinsip *good university governance* yaitu transparansi dan responsibilitas.
3. Cara implementasi prinsip-prinsip *good university governance* dalam pengelolaan aset tetap di Universitas Muhammadiyah Sukabumi yaitu adanya sistem pendukung pengelolaan aset tetap yang bernama siumpeg.ummi.ac.id. Dengan dukungan sistem maka membawa pengaruh yang baik terhadap tata kelola aset tetap di Universitas Muhammadiyah Sukabumi dalam mencapai *good university governance*, dan cara implementasi yang lainnya yaitu adanya buku pedoman pengelolaan aset tetap yang diberikan oleh PP Muhammadiyah tentu saja hal ini dapat membantu untuk implementasi prinsip GUG dalam pengelolaan aset tetap.
4. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi prinsip-prinsip *good university governance* dalam pengelolaan aset tetap yaitu keterbatasan sumber daya manusia karena peneliti merupakan orang di luar organisasi maka peneliti hanya bisa memberikan saran terkait permasalahan yang terjadi dan kurangnya manajemen waktu serta kurangnya partisipasi dari masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, oleh karena itu apabila ada aset tetap yang kurang terkelola civitas di lingkungan kampus jarang turutan dan hanya mengandalkan pengelola aset tetap, hal ini menjadi penghambat dalam implementasi prinsip-prinsip *good university governance* dalam pengelolaan aset tetap. cara mengatasinya yaitu peneliti membuat tabel *action plan* tentang permasalahan yang terjadi dan

action plan ini akan diserahkan kepada bagian umum pengelola aset tetap dan diharapkan dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan aset tetap.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti setelah melaksanakan penelitian mengenai implementasi prinsip-prinsip *good university governance* dalam pengelolaan aset tetap di Universitas Muhammadiyah Sukabumi sebagai berikut:

1. Proses pengelolaan aset tetap di Universitas Muhammadiyah Sukabumi perlu ditingkatkan lagi, terutama yang menjadi perhatian khusus yaitu pada proses penerimaan aset tetap, pemanfaatan aset tetap, pengamanan dan pemeliharaan aset tetap, juga penghapusan aset tetap.
2. Implementasi prinsip *good university governance* dalam pengelolaan aset tetap di Universitas Muhammadiyah Sukabumi perlu ditingkatkan lagi.
2 prinsip *good university governance* yang menjadi perhatian khusus yaitu transparansi dan responsibilitas.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah prinsip *good university governance* yang lebih bervariasi dan lebih banyak lagi, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk perbandingan

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi. (2022). 10 Kampus Muhammadiyah di Jabodetabek, Dari yang Tertua hingga Termuda. Retrieved from <https://muhammadiyah.or.id>
- Arum, L. P. I. (2019). Sistem Operasi Menggunakan Metode Konversi di Perusahaan Rokok Manufacturing. *Majamecha*, 1(1), 60–68. <https://doi.org/10.36815/majamecha.v1i1.382>
- Aryani Soemitro, R. A., & Suprayitno, H. (2018). Pemikiran Awal tentang Konsep Dasar Manajemen Aset Fasilitas. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 2(0), 1–14. <https://doi.org/10.12962/j26151847.v2i0.4225>
- Ismatullah, I., & Kartini, T. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Dana Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6(12), 186–204.
- Larasati, R., Asnawi, M., Hafizrianda, Y., Akuntansi, P. M., & Cenderawasih, U. (2018). 951-Article Text-3027-3-10-20190502, 2(2), 304–323.
- Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. (2020). Organisasi, Perencanaan, Pengadaan, Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Aset Tetap/Barang PTMA.
- Ramdani, yuni S. (2021). ANALISIS PENATAUSAHAAN ASET TETAP BARANG, 10(2), 310–323.
- Setiabudhi, D. O. (2019). Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance. *The Studies of Social Sciences*, 1(1), 7. <https://doi.org/10.35801/tss.2019.1.1.25014>
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, cv.

- Sunarto SE., M., & Teguh Erawati, S. (2003). Pengantar Akuntansi 2. Yogyakarta: BPFE-UST.
- Wijatno. (2009). Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif, dan Ekonomis. Jakarta: Salemba Empat.